

BAB IV

FAKTOR PENUTUPAN KAWASAN INDUSTRI KAESONG

Ditutupnya kawasan industri Kaesong oleh pemerintah Korea Utara tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa pertimbangan pemerintah Korea Utara sebelum memutuskan kawasan ini sesuai dengan pendapat William D. Coplin yaitu ada beberapa pertimbangan bagi *decision maker* sebelum memutuskan kebijakan luar negerinya

A. WPK (*Workers Party Korea*) sebagai partai pendukung rezim Kim ikut mempengaruhi keputusan dalam penutupan kawasan industri Kaesong

Mengenai domestik politik Copplin menerangkan bahwa politik dalam negeri suatu negara mempunyai peran dalam suatu penyusunan politik luar negeri. Peran tersebut dijelaskan lebih lanjut yaitu adanya ruang interaksi yang saling mempengaruhi antara aktor politik domestik dengan aktor pengambil kebijakan keputusan politik luar negeri. Peran politik dalam negeri terhadap kebijakan politik luar negeri suatu negara sebagaimana dijelaskan dalam Teori William D. Coplin, dipengaruhi oleh aktor-aktor politik dalam negeri yang disebut dengan *policy influencers*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pertama, terdapat empat tipe *policy influencers* dalam politik dalam negeri suatu negara kaitannya dengan penyusunan politik luar negeri yaitu, (1) birokratis, (2) kepentingan, (3) Partai, dan (4) Massa yang mempengaruhi.

Setiap *policy influencers* memiliki kontribusi masing-masing dalam penyusunan politik luar negeri suatu negara. Selain itu, setiap negara memiliki karakter yang berbeda sehingga tidak jarang terdapat tipe dominasi

influencer yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung dari sistem politik dalam negeri negara tersebut.

Dalam konteks politik dalam negeri Korea Utara, disini terlihat bahwa ada satu aktor politik *policy influencer* dominan yang menjadi pertimbangan *decision maker* yang mana disini adalah rezim Kim yaitu Workers' Party of Korea (WPK). Tipe *policy influencer* ini merupakan *Partisan Influencer*, dijelaskan oleh Copplin tipe ini merupakan tipe dari aktor politik dalam negeri suatu negara dimana terdapat keberadaan suatu partai politik yang dapat mempengaruhi penyusunan suatu politik luar negeri di negaranya. Dalam sistem politik dengan partai tunggal maka peran *partisan influencer* atau partai yang mempengaruhi mempunyai peran dan kendali yang kuat dalam penyusunan politik luar negeri.

Menurut buku yang dikeluarkan Kementerian Unifikasi Korea yang berjudul *Understanding North Korea*, Korea Utara diklasifikasikan sebagai Negara yang menganut sistem politik rezim totalitarian. Sistem politik rezim totalitarian ini mempunyai seorang pemimpin (*Supreme Leader*) atau *Suryong* (pemimpin sebagai pusat) yang berkuasa terhadap partai dan juga negaranya. Dalam definisi politik, rezim disini mengacu pada keseluruhan institusi dan organisasi politik yang membentuk kehidupan bermasyarakat dimana otoritas politik mempertahankan kestabilan pemerintahan berdasarkan ketaatan masyarakatnya. Lebih jelasnya, rezim politik Korea Utara bisa didefinisikan sebagai kombinasi dari satu partai yang berkuasa, yang mana itu hal yang lumrah di Negara sosialis dan satu orang yang berkuasa dengan dicirikan dengan kediktatoran pemimpin tertinggi partai yang tak tertandingi, atau *Suryong*.

Lalu untuk struktur power rezim, peran *Suryong* yang merupakan seorang pemimpin, mempunyai kekuasaan absolut kepada partai, pemerintahan dan

militer. Ini karena *Suryong* mempunyai struktur kekuasaan yang tertinggi yang berarti mempunyai *power* melebihi dari seorang pemimpin militer atau pemimpin partai yang mana disini adalah WPK. Karakteristik politik ini sudah berlangsung secara terus-menerus sepanjang sejarah Korea Utara dan partai selalu tunduk pada sistem yaitu satu ideologi dan satu orang penguasa untuk mendukung rezim. Dengan ini bisa disimpulkan Korea Utara lebih tepatnya merupakan Negara yang diperintah oleh seorang *supreme leader* dari partai atau *Suryong centered dictatorship* bukan sebuah Negara yang diperintah oleh satu partai atau dikuasai oleh kediktatoran parta tertentu.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Korea Utara mempunyai *policy influencer* berupa *partisan influencer* yaitu *The Workers' Party of Korea* (WPK). WPK merupakan partai politik pertama, partai politik penguasa dan partai politik terbesar di Korea Utara. Partai tersebut didirikan pada tahun 1949 yang merupakan penggabungan dari *the Workers' Party of North Korea* dan *the Workers' Party of South Korea*.

Peran WPK disini cukup signifikan dalam melegitimasi rezim penguasa. Sebagai contoh pada bulan Oktober tahun 1980 diadakan kongress WPK ke enam yang mana disitu meresmikan Kim Jong il sebagai penerus dari ayahnya Kim il Sung. Peresmian ini tidak hanya untuk memperkuat posisi Kim Jong il sebagai penerus rezim namun juga sebagai formalisasi tradisi negara¹ Setelah sepeninggal Kim Jong il yang tiba-tiba, WPK mendeklarasikan Kim Jong Un yang merupakan anak dari Kim Jong il sebagai “*great successor to the cause of juche*” pada 19 Desember, 201. Kemudian bulan April 2012 pada koferensi partai WPK meresmikan Kim Jong Un sebagai penerus dari rezim Kim. Pada konferensi partai ini WPK juga mendeklarasikan Kim Jong il sebagai

¹ Ministry of Unification, (2014) “Understanding North Korea” hal 31

Eternal General Secretary dari menyusul Kim il Sung sebagai *Eternal President of the country* yang sudah diresmikan sebelumnya². Proses deklarasi dan peresmian oleh WPK ini menunjukkan bahwa peran partai disini cukup signifikan untuk mendukung rezim yang memerintah dengan melegitimasi siapa yang akan menjadi penguasa atau penerus rezim.

Untuk memahami pengaruh WPK sebagai *policy influencer*, sebelumnya akan dijelaskan bagaimana Korea Utara dalam proses mengambil keputusan. Menurut Coplin, dalam sistem politik dengan partai tunggal peran *partisan influencer* atau partai yang mempengaruhi mempunyai peran yang signifikan dan kontrol yang kuat dalam penyusunan politik luar negeri. Dalam kaitannya untuk membuat keputusan, Korea Utara tidak jauh berbeda dengan sistem yang berada di China atau Negara sosialis lainnya. Di Korea Utara, segala isu penting dari hubungan internasional dibuat dan diputuskan pada level kepemimpinan tertinggi di kongress *Workers Party Korean* (WPK), rapat pleno WPK *Central Committee*, dan rapat pertemuan pada WPK *Central Committee Politburo and Secretariat*³. Seperti yang tadi sudah dibahas bahwa Korea Utara merupakan Negara yang diperintah oleh seorang *supreme leader* dari partai yang merupakan juga pemimpin partai, maka dalam memutuskan kebijakan luar negerinya Kim Jong il dan Kim Jong Un membutuhkan pertimbangan partai pada saat pertemuan partai WPK. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan sekretaris senior komite

² Human Right Watch, "Q&A: The 7th Congress of the Worker's Party of Korea" diakses pada 13 April 2017 melalui <https://www.hrw.org/news/2016/05/05/qa-7th-congress-workers-party-korea>

³ Zhebin, Alexander. (2012). "The Foreign Policy of the DPRK," *Xinhua Hong Kong Service*

sentral WPK, Kim Yang-gon, yang dikutip Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) bahwa Pyongyang untuk sementara juga akan menghentikan operasi di kawasan Kaesong dan sedang dikaji lebih lanjut. Lebih lanjut pada tanggal 8 April 2013, Kim Yang Gon menyatakan bahwa ada dua langkah penting yang akan Korea Utara lakukan, pertama yaitu Korea Utara akan menarik seluruh pekerjanya dan kedua yaitu akan menimbang eksistensi kawasan industry Kaesong apakah akan ditutup sementara atau selamanya⁴

Selain itu, sikap pesimisme dari partai WPK sudah terlihat yang mana dinyatakan pada saat perencanaan pembangunan Kaesong bahwa partai akan selalu siap untuk menutup kawasan industry Kaesong, menyusul pernyataan dari Kim Jong il selaku ketua partai pada rapat WPK dimana sering mengingatkan kepada kadernya untuk tidak banyak berharap pada Kaesong karena itu merupakan tidak hanya sebatas kerjasama ekonomi tetapi digunakan oleh Korea Selatan sebagai alat propaganda⁵. Jika kita hubungkan dengan isu penutupan kawasan industry Kaesong yang mana itu merupakan isu hubungan antara kedua korea maka bisa kita tarik kesimpulan WPK mempunyai andil dalam memutuskan kebijakan tersebut. Berarti dalam isu ini bisa dikatakan bahwa disini penutupan kawasan industry yang pertama pada tahun 2009 yang mana Kim Jong il yang pada saat itu berkuasa dan penutupan industri yang kedua pada tahun 2013 yang mana Kim Jong Un sudah menggantikan ayahnya WPK merupakan *policy influencer* dalam kebijakan tersebut

⁴ Comparative Connection, "Curtains for Kaesong?" diakses pada 3 September 2018 melalui <http://cc.csis.org/2013/05/curtains-for-kaesong/>

⁵ Daily NK, "Kim Issued 'Close Kaesong' Order" diakses pada 3 september 2018 melalui <https://www.dailynk.com/english/kim-issued-close-kaesong-order/>

B. Pengaruh kuat China dalam kondisi ekonomi membuat Korea Utara tidak bergantung pada Kaesong dan kuatnya militer Korea Utara

Menurut Copplin, pengambil keputusan atau *policy maker* harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer dalam membuat kebijakan luar negeri mereka. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya dalam menyusun politik luar negeri. *Policy maker* harus mengukur akan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer⁶

Dalam memahami bagaimana Korea Utara mengambil keputusan tersebut maka kita harus melihat seberapa besar kemampuan ekonomi dan militer Negara pembuat keputusan untuk menerima resiko akan kebijakan yang dibuatnya. Merujuk pada pendapat Copplin, untuk mengukur kekuatan ekonomi sebuah Negara dapat diukur dengan GNP (*Gross National Product*) indikatornya semakin besar GNP sebuah Negara maka akan semakin makmur. Korea Utara sendiri mempunyai total pendapatan GNP (*Gross National Product*) Korea Utara pada tahun 2011 sebesar US\$ 29,3 miliar dan mempunyai pertumbuhan hanya 0,8%. Dalam keterbatasan kemampuan ekonomi tersebut, Korea Utara selama ini bergantung pada bantuan luar negeri sejak blok sosialis hancur pada pertengahan tahun 1990-an. Salah satu Negara yang sering memberikan bantuan luar negerinya yaitu China yang mana hampir setengah dari total seluruh bantuan luar negeri China diberikan kepada Korea Utara. Sebagai contoh, pada tahun 1996, Beijing menyetujui untuk

⁶ William D Copplin dan Marsedes Marbun (2003). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo edisi ke 2.. 30

memberikan bantuan tahunan dalam bentuk 1,3 juta ton minyak mentah dan 2,5 juta ton batu bara selama lima tahun⁷.

Membahas mengenai kondisi ekonomi yang dimiliki oleh Korea Utara, disini negara China merupakan salah satu mitra terbesar Korea Utara dalam kerjasama ekonomi. Sebagai Negara yang menganut isolasi dalam perekonomiannya, Korea Utara lebih sering bergantung pada China dalam stabilitas dan perkembangan ekonominya. China merupakan sekutu terdekat yang menyediakan bantuan makanan, bahan bakar, mesin industry, investasi dan bantuan ekonomi lainnya.

Sekitar lebih dari setengah aktivitas perdagangan Korea Utara yaitu dengan China. Volume perdagangan Korea Utara makin membesar seiring dengan tingkat dependensi Negara tersebut dengan China. Pada tahun 1999, Total perdagangan Korea Utara dengan China mencapai 370 juta US dollar atau sekitar 20,4 persen dari total perdagangan luar negeri Korea Utara yang sebesar 1,81 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2013, total perdagangan Korea Utara dengan China melonjak hingga mencapai 89,1% dari total perdagangan luar negerinya atau setara dengan 8,48 miliar US dollar. Berikut adalah tabel total perdagangan luar negeri Korea Utara dengan China yang dilansir oleh Kementrian Unifikasi Korea Selatan

⁷ Nanto, Dick K. (2011) "Korea's Economy", Korea Economic Institute of America

Tabel 4.1 Total Perdagangan antara Korea Utara dengan China

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah	78,5	83	89,1	88,3	89,1
(%)					

Sumber: Ministry of unification, (2014) “Understanding North Korea”

Dengan adanya data tersebut terlihat bahwa ketergantungan Korea Utara dengan Negara China terbilang cukup besar dalam perekonomian negaranya yaitu pada tahun 2009 sebesar 78,5% sedangkan terhitung pada tahun 2013 mencapai 89,1% dari total perdagangan. Dari kondisi ekonomi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa persentase ketergantungan Korea Utara akan Korea Selatan disini terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan China, yang mana berarti jika Kawasan Industri Kaesong ditutup maka signifikansi terhadap kondisi ekonomi Korea Utara tidak terlalu besar

Kemudian selanjutnya dalam hal kapabilitas militer. Sesuai dengan dengan teori Copplin mengenai pengambilan keputusan, bahwa faktor kapabilitas militer Negara merupakan salah satu pertimbangan *decision maker* dalam memutuskan kebijakan internasionalnya. Mengenai konteks kapabilitas militer Korea Utara disini mempunyai kekuatan militer yang cukup besar. Hal ini dikarenakan pemerintah Korea Utara mengeluarkan kurang lebih sekitar seperempat GDP (*Gross Domestic Product*) negaranya untuk bidang militer. Menurut *State Department's World Military Expenditures and Arms Transfers* pada laporannya menyatakan bahwa kira-kira

Korea Utara menghabiskan kurang lebih sekitar 4 miliar US dollar tiap tahunnya⁸.

Untuk bidang militer, Copplin berpendapat bahwa ada 3 kriteria utama, yaitu; jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya. Ketiga kriteria tersebut menjadi pembeda antara kekuatan-kekuatan militer suatu negara. Dengan bertumpu pada ketiga kriteria tersebut, *decision maker* dapat melihat sejauh mana kebijakannya akan efektif. Berikut tabel perbandingan jumlah anggota militer dan perlengkapan yang dimiliki antara Korea Utara dan Korea Selatan

⁸ Korea Times, "N. Korea spends quarter of GDP on military from 2002-2012: US data". Diakses pada 9 April 2017 melalui http://m.koreatimes.co.kr/phone/news/view.jsp?req_newsidx=194

Tabel 4.2 Perbandingan Anggota Militer Korea Utara – Korea Selatan

Nama Unit	Jumlah yang dimiliki Korea Utara	Jumlah yang dimiliki Korea Selatan
Angkatan Darat	1.020.000 personil	506.000 personil
Angkatan Laut	60.000 personil	68.000 personil
Angkatan Udara	110.000 personil	65.000 personil
Total	1.190.000 personil	639.000 personil

Sumber: Ministry of unification, (2014) “Understanding North Korea”

Tabel 4.3 Jumlah Perlengkapan Senjata Angkatan Darat antara Korea Utara dan Korea Selatan

Nama Perlengkapan	Jumlah yang dimiliki Korea Utara	Jumlah yang Dimiliki Korea Selatan
Tank	4.200 unit	2.400 unit
Kendaraan lapis baja	2.200 unit	2.700 unit
<i>Field Artileries</i>	5.300 unit	8.600 unit
<i>multiple rocket launcher (MRL/MLRS)</i>	200 unit	4.800 unit
<i>Ground to Ground missiles</i>	30 unit	100 unit

Sumber: Ministry of unification, (2014) “Understanding North Korea”

Tabel 4.4 Jumlah Perlengkapan Senjata Angkatan Laut antara Korea Utara dan Korea Selatan

Nama Perlengkapan	Jumlah yang dimiliki Korea Utara	Jumlah yang Dimiliki Korea Selatan
Kapal Amphibi	260 unit	10 unit
Kapal Perang	420 unit	120 unit
Kapal Selam	70 unit	10 unit

Sumber: Ministry of unification, (2014) "Understanding North Korea"

Tabel 4.5 Jumlah Perlengkapan Senjata Angkatan Udara antara Korea Utara dan Korea Selatan

Nama Perlengkapan	Jumlah yang dimiliki Korea Utara	Jumlah yang Dimiliki Korea Selatan
Pesawat Perang	820 unit	460 unit
Pesawat Transport	330 unit	40 unit
Pesawat Pengintai	30 unit	50 unit
Helicopter	300 unit	680 unit

Sumber: Ministry of unification, (2014) “Understanding North Korea”

Berdasarkan data tabel diatas, pada Januari 2012 jumlah angkatan militer Korea Utara sekitar 1,19 juta personil yang mana terdiri dari 1,02 juta personil angkatan darat, 60.000 angkatan laut dan 110.000 angkatan udara. Jika dibandingkan dengan kedua angkatan militer Negara, Korea Utara lebih besar hampir dua kali dari Korea Selatan yang hanya mempunyai total 639.000 personil angkatan militer

Mengenai tingkat pelatihan militer, salah satu ciri khusus dari angkatan militer Korea Utara yaitu fokus dengan spesialisasi khusus dalam mekanisasi senjata, kendaraan lapis baja dan *special operation forces*. Dengan angkatan militer yang memiliki keahlian mekanisasi dan

kendaraan lapis baja, pemerintah Korea Utara yakin bahwa hal tersebut sesuai dengan tipe *topography* di kawasan semenanjung Korea dan juga mempertimbangkan efisiensi dalam membawa teknologi perang terbaru. Selain itu pemerintah Korea Utara juga mempunyai *special operation forces* yang berjumlah 200.000, unit ini dilatih khusus untuk berperang dalam segala keadaan dan memiliki kemampuan untuk mencegah serangan baik dari laut ataupun udara

Kekuatan militer yang dimiliki Korea Utara juga tidak lepas dari teknologi persenjataan nuklir. Pemerintah Pyongyang selama ini fokus membangun kekuatannya melalui persenjataan nuklir yang justru menambah posisi tawar Negara tersebut di dunia internasional. Sesuai pendapat Copplin bahwa militer sebuah negara dapat mempengaruhi posisi tawar (*bargaining position*) dimata negara lain sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan Militer merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Copplin berasumsi bahwa pertimbangan pada aspek kondisi ekonomi dan militer menjadi salah satu faktor pendorong *decision maker* merumuskan suatu formulasi politik luar negerinya di dunia internasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kim Jong Un dalam konteks ini berani untuk menutup Kaesong yang mana merupakan hubungan kerjasama satu-satunya yang dimiliki kedua Korea

A. Latihan militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan

Dalam kaitannya dengan konteks internasional, Copplin menjelaskan bahwa situasi politik yang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi bagaimana Negara tersebut berperilaku. Untuk memahami ini jika kita lihat sejarahnya Korea Utara dan Korea Selatan selama ini belum pernah menyatakan adanya perdamaian di kedua Negara sejak dimulainya perang Korea dari tahun 1950. Pada tanggal 27 Juli 1953 Korea Utara beserta wakil United Nations Command (UNC) menandatangani perjanjian *Korean Armistice Agreement* yang mana merupakan perjanjian aksi gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perjanjian tersebut berisi sebuah kesepakatan untuk tidak melakukan agresi militer hingga sebuah kesepakatan untuk berdamai dicapai⁹.

Dengan kata lain, hubungan kedua korea hingga saat ini masih dalam konteks berperang karena belum adanya kesepakatan damai. Fakta akan situasi politik kedua Negara korea yang masih belum berdamai membuat keadaan saling curiga terhadap kebijakan luar negeri satu sama lain. Antara lain yaitu adanya latihan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dilakukan di semenanjung Korea

Hubungan aliansi militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat sudah dimulai sejak dibuatnya perjanjian bilateral *Mutual Defense Treaty* pada tahun 1953. Perjanjian itu menghasilkan sebuah komitmen hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk membantu satu sama lain jika ada serangan eksternal yang mengancam kedua Negara

⁹ Find Law, "Text Of The Korean War Armistice Agreement" Diakses pada 11 April 2017 melalui <http://news.findlaw.com/cnn/docs/korea/kwarmagr072753.html>

tersebut. Perjanjian itu juga memperbolehkan Amerika Serikat untuk membuat markas militer mereka di wilayah Korea Selatan. Hingga saat ini sekitar 28.500 personil tentara Amerika Serikat yang terdiri dari angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat dan *special operation forces* bermarkas di Korea Selatan¹⁰

Salah satu wujud kerjasama dari aliansi militer tersebut adalah dengan diadakannya latihan militer *Foal Eagle*. Latihan militer dengan kode *Foal Eagle* tersebut merupakan latihan yang berlangsung selama dua bulan dan merupakan latihan militer bilateral terbesar didunia yang diikuti sekitar 10,000 tentara dari Amerika Serikat. Latihan tersebut diadakan sebagai respon simulasi jika terjadi adanya invasi dari Negara luar¹¹.

Adanya latihan militer yang dilakukan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat inilah yang membuat pemerintah Korea Utara menutup kawasan industri Kaesong. Disini maka terlihat pola yang dilakukan pemerintah Korea Utara dalam membuat kebijakannya dimana Kaesong dua kali ditutup pada saat sedang berlangsungnya latihan *Foal Eagle*.

Dua minggu sebelum pemerintah Korea Utara menutup Kawasan Industri Kaesong yang pertama kali, Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang menjalankan latihan militer *Foal Eagle* yang mulai berlangsung sejak 28 Februari 2009. Latihan militer ini juga membuat pemerintah Korea utara mempersiapkan militernya dalam keadaan “siap berperang” dan memandang latihan ini sebagai persiapan untuk invasi¹².

¹⁰ US Department of state, “U.S. Relations With the Republic of Korea”. Diakses pada 17 Maret 2017 melalui <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2800.htm>

¹¹ FP, “[What is Foal Eagle?](http://foreignpolicy.com/2013/04/04/what-is-foal-eagle/)”. Diakses pada 17 Maret 2017 melalui <http://foreignpolicy.com/2013/04/04/what-is-foal-eagle/>

¹² Sun Sentinel, “N. Korea warns it's war-ready”. Diakses pada 17 Maret 2017 melalui <http://articles.sun-sentinel.com/2009-03->

Kemudian adanya latihan *Foal Eagle* pada tanggal 11 Maret 2013 ini juga membuat Kawasan Industri Kaesong ditutup kembali untuk kedua kalinya pada tanggal 27 Maret 2013 atau dua minggu saat dimulainya latihan militer, hal ini dibenarkan dengan tanggapan pemerintah Korea Utara melalui kantor berita KCNA tiga hari setelah penutupan¹³ :

“The north-south military hotline was cut off as the Korean Armistice Agreement has been completely nullified, creating a warlike situation. There exists neither a channel for dialogue nor any communications means between the north and the south.

The entry into the Kaesong Industrial Zone by the south side’s personnel has been put in jeopardy. No one can see an inch ahead as regards the destiny of the Kaesong Industrial Zone. But the puppet group of south Korea, its dutiful media and hack writers are saying that “the north does not take up the issue of the zone because it is a source for its foreign currency income” and talking about “two faces of the north”. They are even insulting the dignity of the supreme leadership of the DPRK.

It is an extremely unusual thing that the Kaesong Industrial Zone is still in existence under the grave situation in which the north-south relations have plunged into a deadlock and the Korean Peninsula is on the verge of a war due to the U.S. and the south Korean warmongers’ vicious moves for

10/news/0903090542_1_north-korea-south-korean-president-lee-kaesong-industrial-complex

¹³ Korean Central News Agency, “DPRK Warns Future of Kaesong Industrial Zone Depends on S. Korea's Attitude”. Diakses pada 17 Maret 2017 melalui www.kcna.co.jp/item/2013/201303/news30/20130330-31ee.html

igniting a nuclear war against the DPRK. Under the situation, the south Korean puppet forces are left with no face to make complaint even though we ban the south side's personnel's entry into the zone and close it. But we have exercised self-restraint, taking into consideration that the closure of the zone on which the livelihood of small and medium businesses of south Korea hinge can leave those businesses bankrupt and lots of people jobless.

In fact, it is the puppet group and small and medium businesses of south Korea, not the DPRK, which benefit from the zone. But the paid media and media men of south Korea have gone thoughtless to become vocal about the zone just like imbeciles bereft of elementary ability for assessing the situation.

If the puppet group seeks to tarnish the image of the DPRK even a bit, while speaking of the zone whose operation has been barely maintained, we will shut down the zone without mercy. The south Korean group should clearly know that its short tongue may bring it an irretrievable misfortune. The DPRK does whatever it says it will and the future of the zone entirely depends on the attitude of the south Korean puppet group.

The south side's businessmen operational in the zone should clearly face up to the situation and reject the rhetoric of the group and its paid media who act just like a "thief crying stop the thief". We will closely follow the movement of the puppet group and the reactionary media. We warn that we will take a resolute measure, should rhetoric insulting the dignity of the DPRK continues."

Lewat pernyataan tersebut latihan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dianggap sebagai provokasi oleh pemerintah Korea Utara yang mana dianggap sebagai persiapan invasi, ditambah dengan pada saat latihan militer tersebut Amerika Serikat menerbangkan pesawatnya yang memiliki teknologi terbaru yaitu *Stealth Bomber B-2* untuk pertama kalinya di perbatasan semenanjung Korea.

Menurut pemerintah Amerika pesawat yang tidak bisa dilacak radar nuklir tersebut diterbangkan bukan untuk provokasi namun sebagai *deterrence*¹⁴. Penguasa Korea Utara Kim Jong Un memberikan pernyataan terkait Kaesong bahwa jika Selatan benar-benar khawatir tentang masa depan Kaesong, mereka harus mengambil sikap untuk menghentikan semua tindakan bermusuhan dan provokasi militer¹⁵. Hal ini juga dinyatakan oleh pemerintah Korea Utara pada tahun 2009 dimana menutup kawasan industri Kaesong sebagai protes atas diadakannya latihan militer *foal eagle*¹⁶.

¹⁴ The Guardian, "North Korea crisis: White House hopes 'strategic patience' will pay dividends" Diakses pada 17 Maret 2017 melalui <https://www.theguardian.com/world/2013/apr/05/north-korea-crisis-white-house-strategy>

¹⁵ Sindonews, "Korut: Jika ingin pulihkan Kaesong, hentikan provokasi militer", diakses pada 3 September 2018. Diakses melalui <http://international.sindonews.com/read/2013/05/05/40/745446/k-orut-jika-ingin-pulihkan-kaesong-hentikan-provokasi-militer>

¹⁶ CBS news, "Korea closes border to south again", diakses pada 3 September 2018. Diakses melalui: <https://www.cbsnews.com/news/n-korea-closes-border-to-south-again/>

